

KOORDINASI KELURAHAN DALAM KEBERHASILAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM **(Studi pada Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

Anisa Putri Damayanti¹, Didik Supriyanto², Hirshi Anadza³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: anisaputri210801@gmail.com*

ABSTRAK

Program Desa Iklim (ProKlim) adalah inisiatif nasional oleh KLHK yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi. Keberhasilan inisiatif semacam ini biasanya bergantung pada koordinasi yang efektif di antara berbagai pemangku kepentingan. Koordinasi berarti menyelaraskan upaya untuk memastikan tindakan yang tepat waktu dan sesuai yang memenuhi tujuan yang telah ditetapkan secara konsisten dan harmonis. Penelitian ini mengevaluasi upaya koordinasi di kecamatan Dadaprejo untuk menilai keberhasilan ProKlim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber primer dan sekunder. Penelitian ini memeriksa elemen-elemen kunci koordinasi seperti komunikasi, pentingnya koordinasi, keterampilan peserta, komitmen, koordinasi intensif, dan perencanaan berkelanjutan. Faktor pendukung ProKlim di Dadaprejo termasuk manajemen sistematis oleh koordinator dan keterlibatan aktif masyarakat, yang penting untuk keberhasilan program. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi tantangan koordinasi untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan memastikan keberlanjutan ProKlim di Dadaprejo.

Kata Kunci: Manajemen Organisasi Publik, Koordinasi

Pendahuluan

Menurut Ellyn Normelan (2016), Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah upaya nasional yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam inisiatif lokal yang bertujuan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi. Melalui program ini, pemerintah memberikan penghargaan kepada komunitas yang terlibat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

ProKlim dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemampuan mereka menghadapi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Inisiatif jangka panjang ini bertujuan mencapai sasaran hingga tahun 2030, dengan target penerapan di 10.000 kampung iklim di berbagai provinsi di Indonesia. Perencanaan hingga 2030, Pencapaian program ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengembangan pada tahun 2012, pelaksanaan pada tahun 2017, penguatan komitmen pada tahun 2020, percepatan pelaksanaan pada tahun 2025, hingga mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) atau target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 (Oktaviana & Setiawan, 2021).

Menurut Malang Posco Media, pada akhir tahun 2022, tiga desa atau kecamatan di Kota Batu menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas partisipasi mereka dalam Program Desa Iklim (ProKlim). Penghargaan diberikan dalam dua kategori. Kecamatan Dadaprejo di Junrejo mendapatkan Trophy, Sertifikat ProKlim Utama, dan Insentif di kategori ProKlim Utama. Sementara itu, Kecamatan Ngaglik dan Temas di Batu masing-masing menerima Sertifikat ProKlim Utama. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu telah mengajukan lima desa/kecamatan untuk Program ProKlim, tetapi hanya tiga yang berhasil memenuhi kriteria seleksi. Kecamatan Sisir dan Desa Oro-Oro Ombo tidak lolos. Penghargaan diberikan berdasarkan berbagai kriteria evaluasi, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), partisipasi masyarakat, sistem irigasi, kesiapsiagaan bencana, dan ketahanan pangan. Pengakuan ini diharapkan dapat mendorong desa dan kecamatan lain di Kota Batu untuk meningkatkan praktik lingkungan mereka. Meskipun belum mencapai status tertinggi, ProKlim Lestari, pencapaian ini dianggap sebagai langkah positif. Diharapkan, keberhasilan Kecamatan Dadaprejo akan menjadi inspirasi untuk perbaikan lingkungan di daerah lainnya.

Dalam keberhasilan suatu program tentunya seringkali melibatkan berbagai pemangku

kepentingan dalam koordinasinya. Koordinasi melibatkan pengaturan sumber daya dan waktu secara sistematis untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil konsisten dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah proses di mana para pemimpin menyusun pendekatan yang terstruktur untuk usaha tim di antara bawahan mereka, memastikan bahwa semua tindakan bersatu untuk mencapai tujuan bersama (Hasibuan, 2006). Selain itu, koordinasi juga merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penghubungan antara orang-orang dan tugas-tugas pekerjaan dalam rangka kerja sama, sehingga dapat menghindari konflik, kekacauan, atau kekosongan tindakan (Sugandha dalam Tololiu, 2022).

Untuk suatu organisasi mencapai keberhasilan yang optimal, penting untuk memperhatikan koordinasi antara berbagai departemen dan tingkatannya. Setiap organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi koordinasi manajemen berjalan secara efektif dan efisien, sehingga anggota dan departemen di dalam organisasi dapat bekerja sama dengan lancar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka (Waruwu *et al.*, 2016).

ProKlim di Kelurahan Dadaprejo menunjukkan kemampuan koordinasi yang sangat baik, yang berkontribusi pada keberhasilan program tersebut. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan lainnya, Di Dadaprejo, ProKlim telah memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk mencapai tujuannya. Model koordinasi yang diterapkan dalam ProKlim akan dievaluasi menggunakan kerangka kerja Handyaningrat (1989). Teori Handyaningrat mengidentifikasi lima faktor kunci keberhasilan dalam manajemen koordinasi: a) komunikasi, b) pemahaman mengenai pentingnya koordinasi, c) keterampilan peserta, d) komitmen dan koordinasi aktif, dan e) perencanaan yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Kelurahan Dadaprejo dalam keberhasilan Program Kampung Iklim (ProKlim)?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat koordinasi dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) kelurahan Dadaprejo?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan koordinasi yang dilakukan oleh Kelurahan Dadaprejo dalam keberhasilan Program Kampung Iklim (ProKlim).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat koordinasi dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) kelurahan Dadaprejo.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam meningkatkan pemahaman khususnya fungsi manajemen koordinasi dan mengeksplorasi manfaat serta dampak dari Koordinasi dalam Keberhasilan ProKlim Kelurahan Dadaprejo. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini referensi untuk melakukan kajian lanjutan dengan tema yang serupa dan menambah referensi bacaan di perpustakaan dan menjadi bahan literatur penelitian sejenis di Universitas Islam Malang.

Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menguraikan hasil yang sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam kaitannya dengan koordinasi Kelurahan Dadaprejo dalam Keberhasilan ProKlim.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding terhadap hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.
3. Bagi pemerintah kelurahan, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai koordinasi yang dilaksanakan dalam ProKlim yang menjadi salah satu cara mengatasi perubahan iklim yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kelurahan maupun dinas terkait agar lebih mengoptimalkan kembali koordinasi yang sudah dijalankan agar ProKlim terus berkembang kedepannya.

Tinjauan Pustaka

Manajemen Organisasi Publik

Menurut Firdausijah (2023), manajemen publik adalah usaha untuk memfokuskan perhatian pada cara organisasi publik menerapkan kebijakan publik yang telah disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja suatu organisasi dapat dinilai berdasarkan seberapa efektif organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Samuel E Overman dari dalam Keban (2008), mengemukakan bahwa Manajemen publik adalah sebuah studi interdisipliner yang mencakup berbagai aspek umum organisasi. Ini menggabungkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, sumber daya fisik, informasi, dan politik di sisi lainnya.

Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012:179), fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan
Berfokus pada persiapan menghadapi ketidakpastian di masa depan akibat perubahan kondisi, dengan hasil dari perencanaan baru akan terlihat seiring waktu.
2. Pengorganisasian

- Mencakup identifikasi tugas-tugas yang diperlukan, pengelompokan tugas, pembagian tugas kepada karyawan, pembentukan departemen, dan penentuan hubungan dalam organisasi.
3. Pengarahan
Melibatkan pembimbingan anggota tim agar bekerja sama secara efektif dan penuh semangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana dan struktur organisasi.
 4. Pengkoordinasian
Sangat penting untuk mencegah kekacauan, konflik, dan kekosongan tugas, pengkoordinasian memastikan bahwa tugas dikelola dengan efisien, sesuai dengan tujuan organisasi, dan sumber daya digunakan secara optimal.
 5. Pengendalian
Mengawasi pelaksanaan proses manajemen dan erat kaitannya dengan perencanaan, dengan kedua fungsi ini saling mendukung satu sama lain.

Koordinasi

Menurut Handyaningrat (2002), koordinasi melibatkan usaha terstruktur untuk memastikan jumlah dan waktu tindakan yang tepat, serta mengarahkan pelaksanaan untuk mencapai hasil yang konsisten dan harmonis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi adalah fungsi kepemimpinan yang berfokus pada penyelarasan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai individu atau departemen. Tujuan utamanya adalah menciptakan keharmonisan. Inti dari koordinasi terletak pada pembentukan kerjasama, saling menghargai, dan pemahaman yang jelas mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab, yang didukung oleh pembagian tugas, spesialisasi fungsional, dan pengawasan hierarkis. Dalam organisasi besar dan kompleks, pemimpin harus mengembangkan, membimbing, mengarahkan, dan mengelola berbagai kegiatan, memastikan bahwa berbagai fungsi dan tugas terintegrasi dan dilaksanakan secara bersamaan di berbagai unit.

Model Koordinasi Handyaningrat (1989) mengidentifikasi lima faktor kunci keberhasilan dalam manajemen koordinasi:

1. Komunikasi
Faktor ini menilai ketersediaan informasi, aliran informasi, dan penggunaan teknologi informasi.
2. Kesadaran akan Pentingnya Koordinasi
Ini melibatkan evaluasi sejauh mana pelaksana memahami nilai koordinasi dan kepatuhan mereka terhadap hasil koordinasi.
3. Kompetensi Partisipan

Fokusnya adalah pada keterlibatan pejabat berwenang dan ahli dalam bidang pembangunan.

4. Komitmen dan Insentif Koordinasi
Ini mencakup adanya kesepakatan, sanksi bagi pelanggar, dan insentif bagi pelaksana koordinasi.
5. Kontinuitas Perencanaan
Ini melibatkan penilaian umpan balik dari pemangku kepentingan pembangunan dan apakah ada perubahan terhadap hasil kesepakatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 3), penelitian deskriptif bertujuan untuk memeriksa kondisi atau situasi tertentu yang telah dikenali, dengan hasil yang dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dan observasi langsung dari lokasi penelitian. Data sekunder, yang mendukung dan melengkapi data primer, diperoleh dari laporan, peraturan, atau situs web yang relevan.

Pembahasan

Koordinasi yang dilakukan oleh Kelurahan Dadaprejo dalam keberhasilan Program Kampung Iklim

a. Komunikasi

Komunikasi dalam ProKlim Dadaprejo menjadi bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan tidak terbatas pada ruang atau waktu. Sesuai dengan hasil penelitian, komunikasi dalam koordinasi Kelurahan Dadaprejo dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) dapat dikatakan sangat baik. Komunikasi berjalan dengan baik melalui adanya informasi yang jelas dan akurat, alur informasi yang baik, dan adanya teknologi untuk memfasilitasi koordinasi dan penyampaian informasi maka akan membantu pada produktivitas dan efisiensi ProKlim.

Informasi mengenai berbagai kegiatan yang ada di ProKlim cepat tersampaikan berkat adanya grup WhatsApp yang memudahkan penyampaian informasi dan koordinasi kegiatan. Selain itu informasi juga dikomunikasikan lewat beberapa pertemuan rutin seperti rapat, rahlil, PKK dan kerja bakti. Setiap akan ada kegiatan yang ada pada ProKlim semua informasi disampaikan dengan jelas, akurat, dan relevan sehingga pengkomunikasian tersebut mendukung berjalannya ProKlim.

Pada ProKlim Dadaprejo, alur informasi yang baik tercermin dalam proses komunikasi antara berbagai pihak. Alur informasi dari pemerintah ke kelurahan, kemudian ke tingkat RW dan RT, serta ke masyarakat, terstruktur dengan baik untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai tujuan dan kegiatan ProKlim. Dalam memastikan bahwa informasi sudah diterima oleh masyarakat, metode seperti pengiriman ulang informasi di grup WhatsApp, meminta respon balasan, dan memantau status baca pesan menjadi langkah-langkah yang dilakukan.

Keberadaan teknologi informasi memfasilitasi alur komunikasi yang efisien dan kolaborasi yang sinergis dalam ProKlim kelurahan Dadaprejo. Teknologi informasi yang digunakan dalam ProKlim Dadaprejo meliputi WhatsApp grup, YouTube, Instagram, dan Facebook. Meskipun ada upaya untuk mengembangkan website, belum ada aplikasi khusus yang tersedia saat ini. Penggunaan berbagai platform tersebut dalam koordinasi ProKlim kelurahan Dadaprejo tidak hanya memungkinkan penyampaian informasi yang cepat dan luas kepada masyarakat, tetapi juga memfasilitasi koordinasi antarunit organisasi seperti RW, RT, dan pengurus ProKlim.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Dalam ProKlim, pemahaman kesadaran akan pentingnya koordinasi mengacu pada pengakuan bahwa untuk mencapai keberhasilan program, semua pihak yang terlibat perlu bekerja secara terkoordinasi dan sinkron. Kesadaran akan pentingnya koordinasi ini mencakup kesediaan untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan memastikan bahwa informasi serta sumber daya tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak terlibat. Tingkat kesadaran koordinasi dalam koordinasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Dadaprejo dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari pemahaman yang kuat dan kesediaan untuk berkolaborasi serta mendukung antara berbagai pihak terlibat dalam ProKlim, dan tingkat ketaatan yang tinggi antar berbagai pihak terhadap hasil koordinasi.

Tingkat pengetahuan yang baik tentang koordinasi bukan hanya memudahkan proses pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam ProKlim. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya koordinasi, semua pihak dapat bekerja secara sinergis dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menginterpretasikan jika tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi dalam ProKlim menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terlibat.

Hal ini tercermin dari kehadiran reguler dalam rapat koordinasi serta pelaksanaan tugas yang terstruktur dengan baik, termasuk pembagian tugas yang jelas di dalam tim ProKlim. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan sebagian kecil masyarakat, upaya komunikasi yang intensif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka. Secara keseluruhan, kesadaran akan pentingnya koordinasi dan ketaatan terhadap hasil koordinasi dalam ProKlim Dadaprejo mencerminkan implementasi prinsip-prinsip koordinasi yang efektif menurut teori Handyaningrat, yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program ini.

c. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan menunjukkan sejauh mana para pihak terlibat dalam program ProKlim memiliki kemampuan, otoritas, dan keterlibatan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif. Kompetensi partisipan dalam ProKlim Kelurahan Dadaprejo dapat dikatakan baik berdasarkan adanya keberadaan pejabat yang berwenang dan keterlibatan ahli di bidang pembangunan dalam membangun kompetensi partisipan yang efektif. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan dukungan kelembagaan terhadap program, tetapi juga meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam pelaksanaan ProKlim. Dengan demikian, implementasi dan koordinasi yang efektif dapat terwujud melalui kolaborasi yang solid antara pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Kompetensi partisipan pada kelurahan Dadaprejo ditandai dengan adanya pejabat berwenang yang terlibat dan adanya ahli di bidang pembangunan yang terlibat. Pejabat berwenang yang terlibat dalam ProKlim Dadaprejo yaitu KLHK dan DLH Kota Batu yang secara signifikan dalam memberikan pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat, serta menyediakan infrastruktur pendukung seperti tempat sampah, biopori, sumur resapan, dan vertikal garden. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis dan operasional dapat dijalankan

dengan efektif, serta menjaga koordinasi yang lancar antar berbagai pihak terlibat.

Dalam ProKlim di Kelurahan Dadaprejo, keterlibatan ahli di bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, dan Kepariwisata (LHPK) dari pemuda karang taruna serta dukungan dari staff Kelurahan, terutama bagian Kesra, mencerminkan adanya komitmen untuk memperkuat aspek pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Meskipun tidak selalu turun langsung ke lapangan, mereka memberikan kontribusi dalam hal teknis, strategis, dan administratif yang mendukung implementasi ProKlim secara efektif.

d. Kesepakatan Komitmen dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan yang jelas, komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam ProKlim, dan pendekatan insentif yang lebih berbasis pada apresiasi dan kesadaran, menunjukkan bahwa implementasi konsep kesepakatan komitmen dan insentif dalam koordinasi ProKlim Dadaprejo telah memperkuat kerja sama antarpihak dan meningkatkan efektivitas program. Kesepakatan yang jelas membantu mengurangi kebingungan dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pemahaman atau ekspektasi. Selain itu, komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi jaminan bahwa mereka akan berusaha keras untuk mencapai tujuan bersama, sementara insentif memberikan tambahan dorongan untuk mempertahankan tingkat motivasi yang tinggi.

Kesepakatan yang terbentuk di Kelurahan Dadaprejo, baik dalam bentuk formal seperti kebijakan tertulis maupun tidak formal seperti perjanjian di dalam kelompok, memberikan landasan yang kuat untuk koordinasi efektif. Hal ini mencerminkan pemahaman bersama tentang tujuan dan tanggung jawab, sesuai dengan teori koordinasi yang menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas dan diterima oleh semua pihak terlibat. Komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak terkait dalam ProKlim Dadaprejo dalam menjaga momentum dan konsistensi pelaksanaan program, mendukung efektivitas koordinasi. Komitmen ProKlim kelurahan Dadaprejo tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesepakatan, baik dalam kegiatan formal seperti manajemen sampah maupun dalam upaya-upaya informal.

Terdapat dua jenis kesepakatan yang diterapkan dalam pengelolaan kegiatan ProKlim. Kesepakatan formal meliputi

peraturan dan kebijakan tertulis terkait manajemen sampah dan aturan-aturan lain yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Proses pembuatannya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan dari program tersebut. Di samping itu, terdapat juga kesepakatan tidak formal yang sering kali dibuat dalam bentuk perjanjian di dalam grup atau pada pertemuan PKK terkait. Contohnya adalah perencanaan kerja bakti atau penugasan tugas kebersihan wilayah yang disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dadaprejo tidak hanya berkomitmen pada kesepakatan formal yang tertulis, tetapi juga aktif dalam menjaga konsistensi melalui kesepakatan tidak formal yang berlaku di tingkat RT atau dalam kegiatan sehari-hari.

e. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan dalam koordinasi Kelurahan Dadaprejo tidak hanya mencakup aspek keberlanjutan dalam menjalankan program, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan umpan balik dari pihak terlibat dan merespons perubahan yang mungkin terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program tidak hanya berjalan secara berkelanjutan, tetapi juga efektif dalam mencapai dampak yang diinginkan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya umpan balik, koordinator dapat mengevaluasi sejauh mana program sudah mencapai tujuan yang diharapkan dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan atau penyesuaian.

Kontinuitas dalam ProKlim Dadaprejo, dapat dikatakan baik ditandai dengan adanya penerimaan dengan baik umpan balik dari obyek dan subyek oleh ProKlim kelurahan Dadaprejo dan adanya perubahan terhadap hasil kesepakatan menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas Kelurahan Dadaprejo dalam menjalankan ProKlim. Dalam ProKlim kelurahan Dadaprejo adanya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan ditandai dengan ProKlim yang secara aktif menerima masukan dari masyarakat terkait program ProKlim. Umpan balik ini meliputi saran, evaluasi, dan pendapat dari masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh inisiatif tersebut.

Respons positif dari kelurahan dan ProKlim ini mencerminkan komitmen yang kuat dari kelurahan dalam menjaga interaksi yang harmonis dan produktif dengan masyarakat serta dalam menjalankan program ProKlim dengan efektif. Dengan mendengarkan

dan merespons umpan balik secara baik, Kelurahan Dadaprejo memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan bersama..

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam koordinasi ProKlim

a. Faktor Pendukung dalam koordinasi ProKlim

1. Kemampuan Koordinator dalam Menjalankan Fungsi Manajemen

Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pengarahan yang konsisten, serta pengendalian yang efektif memainkan peran penting dalam memfasilitasi koordinasi kegiatan ProKlim. Koordinator ProKlim di Kelurahan Dadaprejo menunjukkan kemampuannya dalam merancang program secara sistematis. Hal ini termasuk pembentukan tim, identifikasi masalah lingkungan, penetapan tujuan jangka panjang dan pendek, serta pengembangan rencana aksi yang terperinci.

Pengorganisasian di ProKlim dilakukan dengan pembentukan struktur organisasi yang jelas, dengan penanggung jawab untuk setiap kegiatan, seperti bank sampah dan pembuatan ecoenzim. Pengarahan dalam ProKlim melibatkan pelatihan dan edukasi rutin yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam program. Pengendalian dalam ProKlim dilakukan melalui pengamatan, penegakan peraturan, dan tindakan perbaikan apabila diperlukan.

Secara keseluruhan, ProKlim di Kelurahan Dadaprejo berhasil mengintegrasikan aspek-aspek manajemen yang efektif untuk mendukung koordinasi kegiatan. Dengan perencanaan yang sistematis, pengorganisasian yang baik, pengarahan yang konsisten, dan pengendalian yang efektif, program ini dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Komitmen terhadap pengendalian yang efektif dan dukungan dari semua pihak yang terlibat sangat penting untuk menjaga keberhasilan dan keberlanjutan ProKlim di masa depan.

b. Faktor Penghambat dalam koordinasi ProKlim

1. Keterbatasan pengetahuan beberapa masyarakat mengenai ProKlim

Pemahaman beberapa masyarakat tentang ProKlim, termasuk tujuan, manfaat, dan penerapan kegiatannya, masih sedikit terbatas. Keterbatasan pengetahuan ini berdampak terhadap koordinasi dalam implementasi ProKlim di Kelurahan Dadaprejo. Tanpa pemahaman yang memadai tentang tujuan dan manfaat ProKlim, masyarakat tidak dapat berkontribusi secara maksimal dalam kegiatan-kegiatan program.

Kurangnya pengetahuan juga berpotensi menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya, masyarakat mungkin tidak mengetahui bagaimana cara yang benar dalam melakukan kegiatan konservasi atau pengelolaan sampah yang sesuai dengan pedoman ProKlim. Akibatnya, dalam pelaksanaan program akan sedikit mengalami kendala mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau bahkan menghadapi masalah dalam pelaksanaannya jika tidak segera diatasi dengan cepat dan tepat.

2. Keterbatasan Waktu dan Fokus Koordinator

Selain mengurus ProKlim, koordinator juga harus menjalankan tugas-tugas lain di luar program, seperti pekerjaan sehari-hari. Ini memaksa mereka untuk membagi fokus dan waktu dengan sangat cermat agar semua aspek program dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kewajiban lainnya. Pembagian perhatian antara ProKlim dan tugas-tugas lain memerlukan pengaturan waktu dan fokus yang hati-hati agar program tetap berjalan lancar.

Keterbatasan waktu dan fokus cukup berdampak langsung pada koordinasi pelaksanaan ProKlim. Ketika koordinator harus menangani banyak tanggung jawab secara bersamaan, ada risiko bahwa beberapa aspek dari program mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, kurangnya pengawasan yang memadai, dan penurunan kualitas koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, pengaturan waktu yang tidak optimal dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah yang muncul.

Kesimpulan

Koordinasi dalam ProKlim Kelurahan Dadaprejo dapat dikatakan baik. Hal tersebut didasarkan baik dari segi komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan komitmen, maupun kontinuitas perencanaan. Koordinasi yang sinergis antara lurah Dadaprejo, ketua ProKlim, koordinator atau PJ kegiatan, serta berbagai pihak lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan maupun berbagai program yang ada di ProKlim Kelurahan Dadaprejo. Kemudian, faktor pendukung dalam koordinasi kelurahan Dadaprejo yaitu kemampuan koordinator dalam menjalankan fungsi manajemen dan partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan Faktor pendukungnya yaitu keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai program kampung iklim dan keterbatasan waktu dan fokus koordinator.

Saran

1. Sosialisasi dan edukasi secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ProKlim. Edukasi bisa dilakukan dalam bentuk seminar atau pelatihan singkat mengenai pentingnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui kegiatan-kegiatan rutin warga seperti PKK, tahlil, arisan, maupun pertemuan warga lainnya. Mendistribusikan materi informasi seperti brosur, leaflet, atau poster yang menjelaskan ProKlim secara sederhana dan menarik. Memaksimalkan penggunaan media sosial dan platform komunikasi lokal untuk memperluas jangkauan informasi.
2. Membuat jadwal yang terstruktur dan merencanakan waktu secara efektif untuk mengatur koordinasi pada setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam ProKlim. Pengoptimalan penggunaan sumber daya yang ada untuk meminimalisir beban kerja koordinator serta pemantauan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan semua sumber daya digunakan dengan efisien.

Daftar Pustaka

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiarso, A. (2019). *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar*. In F. (AUS) Dr Adi Budiarso (Ed.), 2019 (Vol. 1). IPB Press.
- Ellyn Normelan, et.al (2016). *Program Kampung Iklim*. ILambung Mangkurat University Press Banjarmasin.
- Firdausijah, R. T. (2023). *Konsep Dasar*

Manajemen Publik. In *Manajemen Sektor Publik*. www.globaleksekutifteknologi.co.id

- Handyaningrat, soewarno. 1989. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handyaningrat, 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Randi, 2018. *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga
- Miles, Huberman, Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Edition 3*. (Arizona State University)
- Noor, H. Z. Z. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi: tahun 2015*. Deepublish.
- Safroni, Ladzi (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya. : AdityaMedia Publishing, Indonesia. Surabaya. : Aditya Media Publishing
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.

Jurnal:

- Alya, N. (2022). Pengaruh Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 2(4).
- Febrianto, G., Ati, N. U., & Anadza, H. (2021). Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pesanggrahan Kota Batu. *Respon Publik*, 15(7), 55-61.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompia, A. T., & Attijani, M. K. (2023). Efektifitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Banjir Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 238-249.
- Oktaviana, R. F., & Setiawan, R. (2021). Analisis Jejaring Aktor Dalam Program Kampung Iklim Kelurahan Bukit Cermin Analysis Of Actor Networks In The Climate Village Kampung Iklim (Proklm). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19, 73–83.

Setiawan, I. (2021). Pengaruh Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kerja Pengurus LPM Kelurahan Pasir Impun. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(4), 301-314.

Tololiu, W. R., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2022). Koordinasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(122), 48–55.

Wardani, I. P., & Utama, S. J. (2022). Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 53-61.

Waruwu, K., Magister, P., & Komunikasi, I. (2016). Strategi Keberhasilan Organisasi berdasarkan program Organizational Development and Change. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 16–27.

Dasar hukum dan Undang-Undang:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim

Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
SK.1084/MENLHK/PPI/PPI.0/10/2022

Website:

Siaran Pers Nomor:

SP.084/HUMAS/PP/HMS.3/3/2021.from
<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5870/perkembangan-ndc-dan-strategi->
(Diakses pada 20 Februari 2024)

Malang Posco Media. 2022. Tiga Kelurahan Berhasil Raih Penghargaan.
<https://malangposcomedia.id/tiga-kelurahan-berhasil-raih-penghargaan/>(Diakses pada Februari 2024).

Tunas Malang, 2023.
<https://tunasmalang.id/kelompok-64-pmm-umm-bantu-warga-dadaprejo-pertahankan-program-adaptasi-dan-mitigasi-iklim/>(Diakses pada Maret 2024).